

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubaupost.com

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Senin

24 Februari 2025

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Yusran-Hamsinah Siapkan Baubau Ibukota Kepton dan Akan Lanjutkan Pembangunan Yang Dilakukan Amirul Tamim dan AS Tamrin



Pewarta: Hengky, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-H Yusran Fahim SE dan Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc telah resmi menahkodai Baubau untuk lima tahun ke depan setelah Presiden RI Jendral (Purn) Prabowo Subianto melantik keduanya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau periode 2025-2030 di istana negara Jakarta Kamis (20/2/2025).

Dalam keterangan persnya usai dilantik, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim mengungkapkan, salah satu yang menjadi perhatian ke depan adalah pembentukan

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Persiapan Angkutan Lebaran 2025



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Senin, 17 Februari 2025 â€“ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pen-

endalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting

dan bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor dipimpin langsung

Lanjutkan ke Hal: 7

Alvin-Syarif Resmi Dilantik Siap Membangun Buton 2025-2030

Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Pasangan Bupati Buton, Alvin Akawijaya, SH dan Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Saafa, ST dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Kepala daerah lainnya di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025. Bupati Buton dan Wakil Bupati Buton, bersama rombongan menggunakan Bus menuju Monas. Ketua DPRD Buton, Mararusli Sihaji SH turut hadir. Rombongan Kepala Daerah di Sultra diberangkatkan dari Hotel Sari Pasifik. Menunggu keberangkatan digunakan para kepala daerah se-Sultra itu berpose bersama di Lobi hotel

Rombongan Pasangan

Lanjutkan ke Hal: 7



Jelang Putusan MK PPHU Pilkada Buton Tengah, Ketua DPRD Sa'al Musrimin Himbau Masyarakat Hormati Putusan MK

Laporan: Ardi

BUTENG, BP- Menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Buton Tengah, Ketua DPRD Buton Tengah, Sa'al Musrimin Haadi, mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga situasi yang kondusif. Dalam keterangannya,



Sa'al Musrimin

Sa'al Musrimin Haadi menegaskan bahwa apapun keputusan yang diambil oleh MK harus dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi yang telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Buton Tengah untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kita harus meng-

Lanjutkan ke Hal: 7

Wamendagri Buka Suara soal Peluang Sanksi Kepala Daerah Absen Retreat

Laporan: Amran

MAGELANG-- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah merupakan amanat undang-undang.

Namun, dia menyatakan tak ada sanksi terhadap kepala daerah yang absen berdasarkan undang-undang. Sanksi, sambutnya, hanya bagian dari kepanitiaan penyelenggaraan



Lanjutkan ke Hal: 7

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Andina Latief, SKM
DIREKTUR



Yusran-Hamsinah Siapkan Baubau Ibukota Kepton dan Akan Lanjutkan Pembangunan Yang Dilakukan Amirul Tamim dan AS Tamrin

Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) dimana saat ini masih menunggu moratorium.

Kemudian juga salah satu janji Gubernur Sultra terpilih Andi Sumanterukka bahwa apabila ada kesempatan untuk mekar, ASR menjadi garda terdepan untuk memecarkan Kepton.

Sedangkan mengenai kesiapan Kota Baubau sebagai ibu kota Provinsi Kepton, Yusran mengakui Baubau sudah sejak berapa tahun lalu sudah sangat siap dibanding dengan daerah-daerah yang di luar mekar.

"Baubau sebenarnya sudah lebih siap. Hanya memang mungkin masalah peluang yang belum didapatkan, tapi saya kira siap, sangat siap," ujarnya.

Sementara itu, dalam menuju 100 hari kerja, H. Yusran Fahim menjelaskan, kondisi Baubau kurang bagus, kurang

UMKM. Karena itu, pihaknya akan mencoba membenahi dan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha.

Sedangkan untuk birokrasi, orang nomor satu di Kota Baubau ini akan berupaya untuk melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu. "Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Amirul, Pak Tamrin, kemudian sampai zaman Pak Rasman akan kami belajar. Semua yang akan kami lakukan, pedoman kami untuk melakukan bekerja nantinya," tegasnya.

H Yusran Fahim mengucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat Baubau yang sudah berpartisipasi, sudah banyak membantu. Pihaknya akan berusaha mewujudkan sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat kampanye,

berusaha sekuat mungkin untuk bisa menunjang dan bekerja lebih baik untuk Baubau.

Sementara itu, di tempat yang sama Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu mengungkapkan, yang sangat penting soal pemekaran Provinsi Kepton adalah dukungan parlemen yakni DPRD Kota Baubau.

"Dengan kehadiran teman-teman dari partai-partai lainnya pun, dan mereka menyatakan siap mendukung, ini adalah tiket jalur cepat untuk bisa kita realisasikan cita-cita kami, sebagai eksekutif menerangkan dukungan penuh dari legislator Kota Baubau," ungkapnya.

Ditambahkan, secara pribadi pihaknya akan berbicara dengan Bupati Busel, Bupati Buton, termasuk Bupati lain yang masuk wilayah Kepton untuk bagaimana bisa mensinkronkan

terutama program-program yang sifatnya strategis nasional, supaya maju bersama.

"Selain Baubau, ada beberapa daerah sekitar yang juga terlibat. Kami berharap dapat mensinergikan program-program strategis nasional agar pemekaran ini dapat terwujud dengan baik," ujarnya.

Dengan demikian karena enam daerah yang masuk cakupan Kepton adalah pilar maka semua harus sama-sama maju supaya bisa melahirkan provinsi yang baru, tapi sudah cukup layak.

Usai pelantikan ini, masyarakat Baubau berharap pasangan H Yusran Fahim dan Wa Ode Hamsinah Bolu dapat membawa perubahan positif dan mempercepat pembangunan kota, termasuk realisasi pemekaran Provinsi Kepton yang telah lama dinantikan. (*)

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Persiapan Angkutan Lebaran 2025

oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti: Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional Nita Yulianis.

Perwakilan Pemprov Sultra yang hadir dalam rakor ini antara lain dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketapang, dan dinas terkait lainnya.

Persiapan Angkutan Lebaran 2025

Dalam pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan moda transportasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2025/1446 H.

Beliau menyampaikan bahwa arus mudik diprediksi mulai 28 Maret 2025, sedangkan arus balik terjadi pada 7 April 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dalam pengelolaan transportasi darat, laut, dan udara.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN RB, Hari Libur Nasional Idul Fitri 2025 ditetapkan pada 31 Maret - 1 April 2025, dengan Cuti Bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025.

"Pada tanggal 1 Maret 2025 kita sudah memasuki Ramadan dan setelah itu kita akan menghadapi pekerjaan besar yaitu ada libur nasional Idul Fitri yang seperti biasa akan terjadi mobilitas yang sangat tinggi dan dalam kalender nasional biasanya lebih ramai daripada nataru sehingga perlu persiapan-persiapan sejak dini terutama karena mobilitas masyarakat yang tinggi pasti akan memerlukan manajemen di bidang transportasi baik darat, laut maupun udara yang betul-betul dipersiapkan yang melibatkan tidak hanya pemerintah pusat baik dari Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, Bidang Pangan dan lain-lain tetapi melibatkan semua pemerintah daerah karena semua akan berdampak," ujarnya.

Mendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Edaran ini bertujuan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi selama periode mudik serta meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di daerah.

Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi juga menyampaikan rekomendasi Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025 untuk menganti-

sipasi kepadatan arus mudik, terutama di jalur-jalur strategis seperti Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

Dudy mengharapkan dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis, mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan WFA, penyediaan rest area selama penyelenggaraan angkutan lebaran 2025, serta monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

Pengendalian Inflasi 2025.

Dalam pembahasan pengendalian inflasi, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi Tahun ke Tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) sebesar 0,76%, sedangkan inflasi Bulan ke Bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%.

Penyumbang utama deflasi adalah sektor:

• Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (-9,16%)

• Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-8,08%)

Faktor utama deflasi di sektor perumahan adalah adanya diskon 50% untuk pengguna listrik di bawah 2200 watt pada Januari dan Februari 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini saat memaparkan mengenai tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-2 Februari 2025 komoditas pendong inflasi di ulan Ramadan dan Idul Fitri didominasi oleh komoditas volatile food dan beberapa komoditas administered prices.

"Perlu diwaspadai kenaikan harga beberapa komoditas akibat tingginya permintaan menjelang ramadan dan Idul Fitri seperti daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras dan emas perhiasan. Meskipun terjadi deflasi pada Januari 2025, terdapat beberapa komoditas yang mengalami inflasi dan perlu menjadi perhatian menjelang ramadan 2025," ungkapnya.

Dalam rakor ini, salah satu fokus utama adalah pemantauan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara, yang mengalami kenaikan IPH di Kabupaten Bombana sebesar 4,98%, menempatkannya dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kenaikan tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025, serta mengantisipasi lonjakan inflasi akibat tingginya permintaan komoditas strategis. (*)

Alvin-Syarif Resmi Dilantik Siap Membangun Buton 2025-2030

Kepala Daerah Kabupaten Buton tiba di Kawasan Monas sekitar pukul 07.10 WIB, melalui Pintu Silang Monas Tenggara, dengan titik turun di Cawan Monas Utara, langsung berjalan kaki menuju venue yang telah disediakan untuk mengikuti proses pelantikan kepala daerah di Istana Negara.

Sebelum pelantikan, Pasangan Alvin - Syarif dan kepala daerah lainnya sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari geladi kotor pada Selasa, 18 Februari 2025 dan geladi bersih pada Rabu, 19 Februari 2025.

Menuju prosesi pelantikan, para Kepala Daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab berjalan kaki dari Monumen Nasional (Monas).

Berdasarkan jadwal, seluruh kepala daerah sudah bersiap di Monas pada pukul 09.00 WIB. Kemudian

setengah jam setelahnya, mereka akan membentuk barisan untuk bersiap-siap memasuki Istana.

Acara pelantikan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Para kepala daerah itu akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

Setelah acara selesai, semua peserta pelantikan dijemput kembali di Silang Monas Utara.

Pada hari pelantikan itu, Monas menjadi salah satu titik paling sibuk. Pelantikan kepala daerah yang digelar di kawasan Istana Kepresidenan membuat arus lalu lintas di sekitarnya lebih padat dari biasanya. Rute kedatangan peserta pelantikan telah diatur dengan ketat. Setiap kelompok peserta memiliki jalur masuk yang berbeda untuk menghindari kemacetan di sekitar Monas.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya, SH yang ma-

suk dalam jajaran Bupati termuda di Indonesia pada awak media nasional mengaku bahagia dan bersyukur atas pelantikan tersebut dan berterimakasih kepada Rakyat Buton yang telah memberikan amanah kepada dirinya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Buton.

Dalam sesi wawancara dengan media televisi nasional, Alvin Akawijaya yang juga Ketua KNPI Sultra menyatakan tekadnya untuk membawa Kabupaten Buton menuju kesejahteraan. Bagi Pasangan Alvin-Syarif, banyak pekerjaan rumah yang harus dia lakukan, terutama memperbaiki infrastruktur di Buton, meningkatkan ekonomi masyarakat serta mendorong perubahan di negeri Penghasil Aspal Alam terbesar di dunia tersebut.

"Tugas Kami selaku pemerintah daerah bersa-

ma-sama masyarakat akan membangun Buton," kata Bupati Buton.

Ditanya tentang efisiensi anggaran, Bupati Buton mengaku tetap optimis bisa melakukan tahapan pembangunan di daerahnya. "InsyaAllah Kami bisa, selama komunikasi kami dengan pemerintah pusat berlangsung baik maka semua bisa kita lalui masa-masa krisis seperti itu," katanya.

Dalam acara pelantikan tersebut, gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi, serta bupati dan wali kota dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia, secara resmi mengucapkan sumpah jabatan mereka di hadapan Presiden dan pejabat negara lainnya. Dengan pelantikan tersebut para Kepala Daerah secara resmi mengemban tugas untuk memimpin daerah masing-masing periode 2025-2030. (*)

Untuk kepala daerah dari dulu. Saya jadi wali kota [Wali Kota Bogor] itu ikut Lemhanas, ikut Mendagri," kata Bima di Media Center Magelang Retreat, Magelang, Jumat (21/2).

Walaupun demikian, politikus PAN itu mengatakan di dalam undang-undang tersebut tak termut sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti program retreat.

"Sanksi itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Ya, jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada. Enggak ada, ya. Tetapi ada kebijakan sesuai dengan tahun pelaksanaan yang akan kita sampaikan nanti sore hari," papar Bima.

Apa yang disampaikan

Bima ini tak lepas dari munculnya instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Akmil.

Bima mengatakan program retreat yang akan dilaksanakan mencakup pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Mengenai lokasi pelaksanaannya, kata dia, menyesuaikan pada setiap periodenya.

"Jadi Undang-undang mengamanatkan itu dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Kalau biasanya di BPS-DM, biasanya di Lemhanas, lebih dari satu bulan. Nah, ini dipadatkan tujuh hari di sini (Akmil)," kata

eks Wali Kota Bogor itu.

"Nah, karena ada efisiensi dan ada target-target tadi ini menyesuaikan lokasi di sini begitu," imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2) lalu mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah dari PDIP menunda dulu keberangkatan ke retreat di Akmil Magelang.

Megawati pun meminta para kepala daerah dari PDIP itu untuk bersiaga menunggu instruksi lanjutan dari Ketua PDIP.

Sejumlah kepala daerah kader PDIP a menghormatinya. Ada yang berkumpul di Kantor DPD PDIP DI Yogyakarta, ada pula yang masih di Jakarta. (*)

Jelang Putusan MK PHPU Pilkada Buton Tengah, Ketua DPRD Sa'al Musrimin Himbau Masyarakat Hormati Putusan MK

hormati proses hukum dan apapun keputusan MK nantinya, itu adalah hasil dari mekanisme konstitusional yang harus diterima dengan lapang dada," ujarnya, Sabtu (22/2/2025).

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang terpancing dengan isu-isu provokatif yang dapat memecah belah persatuan di Buton Tengah.

Menurutnya, stabilitas daerah harus menjadi prioritas bersama demi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sa'al Musrimin Haadi berharap semua pihak yang berkepentingan dalam Pilkada Buton Tengah dapat menunjukkan sikap dewasa dalam berdemokrasi.

:Mari kita tetap menjaga

kebersamaan, mengedepankan musyawarah, untuk Buton Tengah yang lebih baik kedepannya," tambahnya.

Sementara itu, sejumlah mobil aparat keamanan juga terpantau telah memasuki wilayah mawasangka antisipasi guna memastikan situasi tetap aman menjelang pembacaan putusan MK. Masyarakat pun diimbau

untuk tidak mudah terprovokasi.

Pembacaan putusan MK terkait PHPU Pilkada Buton Tengah dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

Semua pihak diminta untuk menghormati hasil akhir dari proses hukum tersebut dan tetap menjaga situasi yang damai serta harmonis. (*)

"Ini adalah program

rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah, begitu ya.

Wamendagri Buka Suara soal Peluang Sanksi Kepala Daerah Absen Retreat

retreat di Akmil selama sepekan ke depan.

Bima menekankan, retreat kepala daerah adalah

program rutin yang diselenggarakan untuk kepala daerah sebagaimana diatur melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah, begitu ya.

Mendagri Tito: Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Rugi Sendiri



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut para kepala daerah yang tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah hanya akan rugi sendiri.

Laporan: Hadi

MAGELANG- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut para kepala daerah yang tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah hanya akan rugi sendiri.

"Kalau yang enggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti," kata Tito di Kompleks Akmil, Sabtu (22/2).

Tito mengatakan, retret sebagai masa orientasi selama tujuh hari ini penting buat kepemimpinan para kepala daerah yang berlangsung hingga lima tahun ke depan.

Mantan Kapolri itu

berujar, masa orientasi ini jadi wadah bagi masing-masing kepala daerah untuk mengenal dan merencanakan komunikasi satu sama lain.

Tito dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto telah melihat sendiri bagaimana kedekatan-kedekatan itu terbangun saat keduanya meninjau tenda-tenda tempat peserta bermalam.

"Tadi saya datang dengan pak Bima satu per satu ke tenda ada yang dari Jawa, dari Sragen kalau enggak salah, ada yang dari Timur, ya ada yang dari Ambon, gabung, saling kenal. Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, nanti saling bantu, saling

kerja sama," ucapnya.

Mereka yang tak mengikuti kegiatan ini, lanjut Tito, dijamin akan rugi lantaran kehilangan momentum meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

"Nah, ini kepentingannya lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa. Kepentingan untuk rakyat masing-masing," tegas Tito.

Tito sendiri sempat memberikan pembekalan saat membuka retret kepala daerah di Akmil pagi ini. Forum tersebut dihadiri para kepala

daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang mengenakan seragam Satpol PP.

Materi yang diberikan Tito antara lain perihal kedisiplinan, pengelolaan APBD, kebersihan lingkungan serta inflasi.

"Kepala daerah enggak bisa bekerja sendiri. Gubernur enggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota enggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga enggak bisa bekerja sendiri," ujar Mendagri dalam keterangan resmi yang dibagikan Puspen Kemendagri. (*)

Tunggu Arahan soal Retret, 55 Kepala Daerah PDIP Standby di Magelang



Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP masih berkumpul di Magelang, Jawa Tengah menunggu arahan jadwal bergabung ke kegiatan retret di Akademi Militer

Laporan: Hasim

MAGELANG- Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP masih berkumpul di

Magelang, Jawa Tengah menunggu arahan jadwal bergabung ke kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil). "Kepala daerah yang

ada di sini tadi kita absen ada 53. Kemudian ditambah dua gubernur, tentu jadi 55," kata Wali Kota Yogyakarta yang diusung

PDIP Hasto Wardoyo ditemui di salah satu kafe di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Hasto berujar, di kafe tersebut 55 kepala daerah dari PDIP sempat berkumpul. Dua di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Keduanya sudah tak terlihat di lokasi. Beberapa sosok yang nampak adalah Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu dan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti.

Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan

Pramono Jembatani 'Nasib' Kepala Daerah PDIP yang Belum Gabung Retret

MAGELANG-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menjembatani komunikasi antara PDIP dengan pemerintah soal kepala daerah dari partai tersebut yang belum bergabung ke kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP Hasto Wardoyo menyebut, tercatat 55 kepala daerah dari partai yang belum bergabung ke retret Akmil dan masih 'standby' di Magelang.

Pada Sabtu (22/2) siang, mereka menggelar pertemuan di sebuah kafe dan menyepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retret Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Pramono yang merupakan kader PDIP juga hadir dalam pertemuan di kafe tersebut bersama kolega partai lainnya, seperti Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu dan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti.

"Komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," sambung-

nya.

Hasto bilang, komunikasi yang dilakukan Pramono mewakili para kepala daerah PDIP peserta retreat dan keputusan-keputusan di DPP partainya yang selanjutnya dikomunikasikan dengan pemerintah selaku penyelenggara program orientasi gubernur, wali kota, dan bupati.

Hal senada disampaikan Masinton Pasaribu. Dia mengatakan, Megawati telah memberi mandat kepada Pramono sebagai penyambung lidah PDIP ke pemerintah.

"Ibu megawati menugaskan Mas Pram berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi tadi Mas Pram menyampaikan itu kepada kami, ya, bagaimana komunikasi beliau dengan pemerintah dan juga arahan dari Ibu Megawati yang disampaikan ke Mas Pram dan diteruskan kepada kami," jelas Masinton.

Menurut Masinton, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retret. Hanya saja, memang belum ditentukan waktu kapan mereka bergabung ke Akmil.

"Tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram, prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini gitu ya. Jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret dan waktunya

kapan insya Allah dalam satu dua hari ini bisa bergabung," kata Masinton.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, panitia masih menerima kedatangan peserta retret kepala daerah yang tiba di Akmil.

Bima mengatakan, sejauh ini pihaknya setia menanti kabar dari peserta retret yang terdapat masih belum juga hadir sampai siang tadi.

"Intinya kami masih menunggu kabar dan masih sangat terbuka untuk yang belum hadir bergabung di sini," kata Bima di Kompleks Akmil, Magelang.

Disinggung soal tenggat waktu kehadiran di Akmil, Bima tak bicara gamblang. Tapi, dia hanya mengungkapkan bahwa memang ada 'batas kewajaran' untuk alasan terlambat.

"Saya kira semuanya pasti juga sudah memperhitungkan itu, semuanya juga sudah menghitung apabila terlambat ya pasti terlambatnya enggak sampai terlambat banget," katanya.

"Kalau sampai tiga hari enggak ikut kan itu bukan terlambat. Itu enggak memenuhi syarat juga. Mumpung pagi ini baru mulai, ya kita masih menunggu lah. Beri kesempatan," pungkas Bima. (kus)

pemerintah soal keikutsertaan retret dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Tadi, kan, sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan," kata Hasto.

"Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," sambungnya.

Mantan Kepala BKKBN itu bilang, komunikasi yang dilakukan Pramono mewakili para kepala daerah PDIP peserta retret dan keputusan-keputusan di DPP PDIP yang selanjutnya dikomunikasikan dengan pemerintah.

"Sehingga komunikasi yang dilakukan

Pak Pramono tentu itu sudah mewakili dua arah ya, mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," imbuhnya.

Hasto sendiri juga sudah mengenakan seragam Satpol PP layaknya peserta retret. Barang bawaannya juga sudah sampai ke Akmil Magelang.

"Semua baik yang sudah seragam maupun tidak seragam ya semua siap lah. Kan, sudah ada di sini ya. Kan, semua sudah bawa barang-barang. Kan, kopernya sudah di dalam [kompleks Akmil]. Jadi, kan, sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi," beber Hasto.

Selain Hasto, kepala daerah kader PDIP lain, yakni Bupati Magelang Grengseng Pamuji juga nampak sudah berseragam. Grengseng terlihat tak jauh dari kafe lokasi pertemuan para kader banteng.

Megawati sebelumnya mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retret kepala daerah di Akmil Magelang.

Instruksi itu dikeluarkan Megawati pada Kamis (20/2) dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasti diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB.

KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. (Yusuf)

Pengukuhan Kepala OJK, Pj. Gubernur: Lindungi Masyarakat Sultra dari Investasi Ilegal dan Pinjol Ilegal



Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, pada Selasa (18/02/2025).

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, serta pemutaran video kaleidoskop kegiatan OJK, dilanjutkan sambutan Pj. Gubernur Sultra dan Ketua Komisioner Dewan OJK.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, beserta rombongan.

“Selamat datang di Bumi Anoa, tanah yang kaya akan potensi alam dan budaya. Ini merupakan momentum untuk memperkuat sinergisitas dalam mendukung pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujar Andap.

Lebih lanjut, Andap mengapresiasi dedikasi Arjaya Dwi Raya beserta istri, Naomi Mangontan, selama menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra periode 2020-2025.

“Atas nama

pemerintah dan masyarakat Sultra, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasanya dalam lindungan Allah SWT,” ujar Andap.

Pj Gubernur juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala OJK Provinsi Sultra yang baru, Bismi Maulana Nugraha beserta istri, Wintaria Eisha.

“Selamat datang di Bumi Anoa. Selamat bertugas, semoga dapat mengemban amanah dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pengembangan sektor jasa keuangan di Sultra,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur memberikan beberapa pesan kepada Kepala OJK Provinsi Sultra, yakni:

1. OJK diharapkan agar meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi masyarakat Sultra di tengah maraknya aktivitas keuangan ilegal dan kejahatan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023.

2. OJK agar sharing information ke pemerintah daerah untuk langkah integrasi keuangan secara digital tentang sistem pengaturan dan pengawasan sek-

tor jasa keuangan sehingga pemerintah daerah dapat merespon secara cepat dan juga tepat sasaran.

3. Sinergisitas dan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, OJK, pelaku industri jasa keuangan, dan stakeholder terkait, jangan hanya kiasan saja tanpa implementasi nyata di lapangan. Tingkatkan dan perkuat sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan sumber ekonomi baru yang berkelanjutan di Sultra.

4. Pengaturan dan pengawasan diharapkan dilaksanakan secara intens sehingga dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Esensinya, integritas dan kinerja industri jasa keuangan yang baik akan berkontribusi dalam menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di Sulawesi Tenggara.

5. OJK diharapkan berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat di seluruh Jazirah Sulawesi Tenggara sehingga tidak terjadi lagi adanya masyarakat yang dirugikan akibat investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal sesuai dengan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto “Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum yang Tertinggi.”

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra

Siregar, dalam sambutannya menekankan peran penting OJK dalam menguatkan sektor jasa keuangan sejalan dengan implementasi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra menjelaskan bahwa dengan UU P2SK, OJK memiliki tugas tambahan selain mengatur, mengawasi, dan melindungi, yaitu menguatkan dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah, OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di setiap daerah. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sultra atas terbentuknya 1 TPAKD tingkat provinsi dan 17 TPAKD tingkat kabupaten/kota di Sultra.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah,” ujar Mahendra.

Dalam kesempatannya kepada awak media, Andap menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari keuangan ilegal serta dukungan terhadap pengembangan UMKM di Sultra.

“Kami berharap OJK dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal dan mendorong pertumbuhan UMKM yang menjadi penggerak ekonomi di daerah,” ujar Andap.

Turut hadir dalam acara, Ketua Dewan Komisioner OJK, Forkopimda Tk. I Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah dan Pimti Pratama Pemprov Sultra, Deputi Komisioner Hubungan Internasional APU-PPT dan Daerah OJK, Kepala OJK Sulsebar, Kepala Kantor Perwakilan BI, Plt Kepala BPS, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Sultra. (*)

Laksanakan Delegasi Gubernur, Ini Sejumlah Agenda Wagub Sultra Berada di Jakarta

Pewarta: Lisna

JAKARTA - Melaksanakan delegasi Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka maka Wakil Gubernur (Wagub) Ir. Hugua, M. Ling, didampingi Sekda, Drs H Asrun Lio, M. Hum., Ph.D melakukan sejumlah agenda penting selama berada di Kota Jakarta, yang dimulai sejak tanggal 21 Februari 2025.

Sekda Sultra, Sabtu (22/2/2025) mengatakan, usai menerima pendelegasian Gubernur Sultra maka Wagub Sultra langsung menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama jajaran Kantor Perhubungan Sultra di Jakarta.

“Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub Sultra langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri RI, terkait koordinasi tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB berkantor di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” jelas Sekda Sultra.

Sekda Sultra menerangkan, sejak pendelagasian dari Gubernur maka Wagub Sultra untuk sementara waktu berdinasi di Jakarta, hingga pada Tanggal 26 menuju ke Magelang guna bergabung mengikuti agenda yang dimulai sejak Tanggal 27 Februari 2025.

“Saat ini Gubernur Sultra tengah mengikuti kegiatan retreat kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akml) Magelang. Dalam masa tersebut Wagub Sultra mendapatkan delegasi hingga tiba waktunya Magelang pada tanggal 26 Februari untuk mengikuti agenda yang dimulai sejak tanggal 27 Februari 2025,” lanjutnya.

Lebih lanjut Sekda Sultra mengungkapkan bahwa saat melaksanakan tugas perdana tersebut, Wagub Sultra juga memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kantor Penghubung di Jakarta, serta memberikan kesempatan kepada Plt Kepala Kantor Penghubung untuk menjelaskan tugas pokok masing-masing bagian yang ada.

“Dalam penyampaian Gubernur Sultra melalui Wagub Sultra saat rapat koordinasi di Kantor Penghubung di Jakarta bahwa kita tidak boleh lupa terhadap sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang dibentuk dari pernak pernik berbagai suku bangsa yang ada di Bumi Anoa,” katanya.

Masih Sekda Sultra bahwa Gubernur melalui Wagub Sultra tak hentinya menyampaikan bahwa ASR - Hugua hadir untuk memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Sultra.

“Setiap pemimpin ada masanya. Oleh sebab itu, inilah waktu yang tepat untuk ASR - Hugua memberikan pengabdian terbaik. Tentunya tak lepas dari tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga ASR - Hugua menekankan pentingnya kekompakan dalam bekerja, agar tugas utama ASN sebagai pelayanan publik bisa terlaksana dengan baik pula,” tutur Sekda menyampaikan pesan Gubernur Sultra melalui Wagub Sultra saat melakukan rapat koordinasi di Kantor Penghubung di Jakarta. (*)

Asrun Lio Buka Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika PPPK

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada instansi Pemerintah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI. (Senin, 17/02/2025)

Kegiatan yang dibuka Pj. Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi Sultra, dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sultra, pejabat struktural, widyaiswara dan pejabat fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio mengatakan, Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada BPSDM Sultra yang telah berusaha memfasilitasi yang diperlukan demi terselenggaranya acara orientasi ini, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, PPPK merupakan bagian dari ASN yang telah memenuhi syarat, dan di-

angkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan orientasi ini merupakan langkah percepatan penyesuaian diri bagi peserta PPPK, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan kepala lembaga administrasi negara nomor 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi pppk dan merupakan langkah awal yang sangat penting, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan kompetensi bagi ASN sesuai tuntutan tugas jabatannya. Selain pengembangan kompetensi tersebut, dalam rangka pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai ASN serta dalam rangka implementasi core value ASN berakhlak dan employed branding yakni bangga melayani bangsa,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dalam kegiatan ini akan membahas berbagai ni-

lai dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Nilai-nilai ini mencakup kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Selain itu juga, akan membahas isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2025.

“Beberapa isu penting yang akan kita hadapi antara lain adalah memperkuat ideologi pancasila, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi digital. sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional ini. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” paparnya.

Ia berharap, melalui orientasi ini, semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. “Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kompetensi dan integritas kita dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tandasnya. (AR)

Alvin-Syarif Siap Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat



Pewartu: Burhan

BUTON, BP-Bupati Buton dan Wakil Bupati terpilih menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Buton. Hal itu disampaikan pasangan Alvin-Syarif ketika menghadiri silaturahmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030, Rabu malam, 19 Februari 2025 di Jakarta.

Silaturahmi tersebut digelar Pemerintah Provinsi Sultra. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Gubernur Provinsi Sultra terpilih periode 2025-2030 yang juga selaku inisiator serta fasilitator kegiatan dimaksud, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka beserta istri. Wakil Gubernur Sultra terpilih Ir. HUGUA, M.LING dan istri. Hadir juga mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol (P) DR. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, Sekda Sultra Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D

Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, para Bupati/Walikota terpilih periode 2025-2030 beserta istri/suami. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sultra. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sultra, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Sultra mengatakan silaturahmi tersebut untuk mengaktifkan para kepala daerah terpilih se Sultra untuk saling bertemu dalam satu momen bersama, mengingat setelah pelantikan maka seluruh agenda-pemerintahan secara otomatis langsung berjalan dan penuh kepadatan jadwal.

Setelah dilantik maka para kepala daerah terpilih, termasuk Gubernur Sultra dan Wakil Gubernur Sultra langsung mengambil alih kendali pemerintahan, sehingga semua agenda pemerintah berjalan dan tentu sangat sibuk, kata dia.

Dia melanjutkan, khusus untuk Sultra maka usai kegiatan pelantikan di Istana Kepresidenan RI maka Pemprov Sultra berkoordinasi dengan Gubernur Sultra. Kemudian Gubernur Sultra akan memimpin rapat bersama OPD secara virtual langsung dari Jakarta.

Semoga acara silaturahmi ini membawa manfaat bagi kita semua dan menjadi awal sinergi yang baik dalam membangun Sultra ke depan, harapnya.

Ketua Panitia kegiatan yang juga Kepala Karo Pemerintahan Setda Pemprov Sultra, menyampaikan laporannya bahwa kegiatan tersebut berlangsung di Nusantara Ball Room Hotel Sari Pacific Jakarta, dengan tujuan sebagai bentuk silaturahmi dan koordinasi antara Pemprov Sultra dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Gubernur terpilih, Mayjen TNI (Purn)

Andi Sumangerukka menyampaikan ucapan terimakasih kepada panitia yang telah menyiapkan penyelenggaraan acara termasuk pendampingan, sehingga para kepala daerah terpilih se Sultra bisa saling bertemu dan bercengkramah.

Acara ini sangat penting sebab setelah acara pelantikan dan orientasi di Magelang maka kita semua akan kembali ke daerah. Tentunya dengan kesibukan masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Walaupun kita belum resmi dilantik, tidak apa-apa silaturahmi ini digelar bersama-sama, guna mengaktifkan waktu dan kesempatan yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi terimakasih kepada panitia penyelenggara, kata dia.

Melalui kesempatan itu, dia juga menyampaikan pentingnya kekompakan agar masalah yang ada di daerah bisa diselesaikan.

Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir Hugua mengatakan, bahwa tugas Wagub sifatnya membantu sehingga dirinya pun siap bersama Gubernur Sultra untuk membangun Sultra yang lebih maju.

Kedepan, kita berada di Rumah Sultra. Kita berada di dalam Rumah Sultra, mari saling menghargai dan bahu membahu mewujudkan pembangunan bersama. Saya pernah berada di Komisi II DPR RI dimana UU dan instrumen hukumnya dirumuskan. Artinya bahwa dalam pelaksanaannya, kekompakan menjadi salah satu hal penting dan ut-

ma. Jadi esensi NKRI mari kita dalam kembali dan wujudkan bersama, kata dia.

Acara Silaturahmi tersebut, para kepala daerah terpilih memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai Walikota Kendari disusula Kepala daerah lainnya.

Bupati Buton terpilih, Alvin Akawijaya, SH menyampaikan terimakasih atas fasilitas diberikan sehingga kekompakan dan kebersamaan bisa terjalin baik. Untuk itu, Buton dibawah kepemimpinannya bersama sang wakil siap bersinergis bersama Pemprov Sultra dan pemerintah pusat.

Wakil Bupati Buton terpilih, Syarifuddin Saafa, ST menyampaikan terimakasih pada panitia yang mempertemukan Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota pada ajang silaturahmi tersebut. Pihaknya bersama Bupati siap bersinergi dan siap menerima arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur.

Adapun 16 Bupati/Wali Kota terpilih bersama wakilnya masing-masing dalam acara silaturahmi tersebut yakni :

1. Kabupaten Buton : ALVIN AKAWIJAYA PUTRA, S.H. dan SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

2. Kabupaten Buton Selatan : H. MUHAMMAD ADIOS, SSos dan LA ODE RISAHAL, S.H.

3. Kabupaten Buton Utara : AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H dan RAHMAN, S.K.M., M.Kes

4. Kabupaten Bombana : Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si. dan AHMAD YANI, S.Pd., M.Si.

Dinkes Buteng Resmi Luncurkan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Mawasangka Tengah



BUTENG, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan (Launching) Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Mawasangka Tengah, Selasa, (11/2/2025).

Acara ini menandai langkah besar dalam peningkatan sistem pelayanan kesehatan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, berkualitas, dan merata hingga ke pelosok desa.

Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, dalam sambutannya menekankan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menuntut layanan kesehatan yang optimal. Media sosial sering menjadi sarana penyampaian keluhan, sementara tantangan dalam sistem jaminan kesehatan juga masih menjadi perhatian serius.

“Kemajuan global menuntut kita untuk terus berbenah. Program Integrasi Layanan Primer diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan hingga ke pelosok desa,” ujar Pj Bupati.

Program ILP dirancang sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional yang menata dan mengoordinasikan layanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Tidak hanya berfokus pada pengobatan, program ini juga menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, agar masyarakat tetap sehat.

Melalui ILP, layanan kesehatan tidak lagi hanya terpusat di puskesmas, tetapi diperluas ke puskesmas pembantu (Pustu), posyandu, serta melalui kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Sejak 2023, Pemkab Buton Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung program ini, baik dari aspek fisik maupun non-fisik. Dari sisi fisik, pemerintah telah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pembangunan dan re-

habilitasi Pustu, serta pemenuhan standar alat kesehatan. Sementara dari sisi non-fisik, pemerintah terus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dan merevitalisasi posyandu agar lebih berfokus pada pencegahan penyakit.

Salah satu indikator keberhasilan dalam peningkatan layanan kesehatan di Buton Tengah adalah penurunan angka stunting yang signifikan, dari 14,4% menuju target 14% pada tahun 2024. Dengan implementasi ILP di 14 puskesmas, diharapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan semakin meningkat dan prevalensi stunting semakin menurun.

Pj Bupati juga mengajak seluruh OPD, pemerintah desa/kelurahan, serta tenaga kesehatan untuk menyukseskan program ini dengan semangat gotong royong.

“Mari kita terus berbenah dan bekerja dengan ikhlas demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Buton Tengah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Buton Tengah menegaskan bahwa ILP merupakan hasil transformasi sistem kesehatan dengan fokus pada promotif dan preventif. Pemilihan Puskesmas Mawasangka Tengah sebagai lokasi peluncuran didasarkan pada statusnya sebagai puskesmas bintang lima dalam pelayanan kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah, Kepala RSUD Buton Tengah, Pj Ketua Dharma Wanita dan PKK, Pj Camat Mawasangka Tengah, Ketua IDI, Ketua PPNI, Ketua IBI, serta Ketua PERSAGI Buton Tengah.

Dengan peluncuran Integrasi Layanan Primer, Pemkab Buton Tengah berkomitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terstruktur, cepat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (*)

5. Kabupaten Kolaka : H. AMRI, S.STP., M.Si dan H. HUSM-ALUDDIN

6. Kabupaten Kolaka Timur : ABD. AZIS, S.H., M.H. dan YO-SEP SAHAKA, S.Pd.

7. Kabupaten Kolaka Utara : Drs. H. NUR RAHMAN UMAR, M.H. dan H. JUMARDING, S.E.

8. Kabupaten Konawe : H. YUS-RAN AKBAR, S.T. dan H. SYAMSUL IBRAHIM, SE., M.Si.

9. Kabupaten Konawe Utara : H. IKBAR, S.H., M.H. dan H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si

10. Kabupaten Konawe Kepulauan : RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T dan MUHAMMAD FARID, S.E.

11. Kabupaten Konawe Selatan : IR-HAMKALENGGO, S.Sos., M.Si dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, S.H.

12. Kabupaten Muna : Drs. H. BACHRUN,

M.Si dan LA ODE ASRAFIL, S.H., M.H.

13. Kabupaten Muna Barat : LA ODE DARWIN dan Drs. ALI BASA, M.S.

14. Kabupaten Wakatobi : H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO

15. Kota Kendari : dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM dan SUDIRMAN

16. Kota Baubau : H. YUSRAN FAHIM, S.E. dan Ir. WA ODE HAMSINAH BOLU, M.Sc. (*)

Rencana Aksi Nasional Kanker Anak 2025-2029: Langkah Strategis Kendalikan Kanker pada Anak di Indonesia

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia (International Childhood Cancer Day) yang jatuh pada 15 Februari 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Nasional Kanker Anak 2025-2029 sebagai bagian dari Rencana Kanker Nasional 2024-2034 pada Kamis (20/2/2024).

Langkah ini merupakan strategi komprehensif dalam pengendalian kanker pada anak di Indonesia, sekaligus wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi anak-anak penderita kanker.

Kanker merupakan penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia, tergolong sebagai penyakit tidak menular (PTM) katastrofik, dengan biaya pengobatan yang tinggi dan durasi perawatan yang panjang. Berdasarkan data Globocan 2022, Indonesia mencatat lebih dari 408.661 kasus baru kanker dan hampir 242.099 kematian akibat kanker.

Sementara itu, kasus kanker anak juga menjadi perhatian utama, di mana pada tahun 2020, terdapat sekitar 11.156 kasus baru kanker pada anak usia 0-19 tahun. Leukemia menjadi jenis kanker paling banyak diderita anak-anak dengan 3.880 kasus (34,8%), diikuti oleh kanker getah bening (limfoma) dan kanker otak, masing-masing dengan sekitar 640 kasus (5,7%).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kanker anak di Indonesia menekankan bahwa penanganan kanker anak harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, melibatkan tenaga medis, komunitas, serta dukungan finansial yang lebih luas. RS Kanker Dharmais sebagai pusat kanker nasional diharapkan menjadi model dalam inovasi layanan kanker,

termasuk dalam upaya mendekatkan akses pengobatan ke seluruh daerah di Indonesia.

Menkes Budi menyoroti pentingnya kombinasi pasien BPJS dan non-BPJS dalam layanan rumah sakit untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan layanan kanker anak. Ia menegaskan bahwa kehadiran pasien non-BPJS bukan untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai strategi subsidi silang agar lebih banyak pasien yang kurang mampu dapat mengakses pengobatan kanker berkualitas.

"Kita ingin agar Rumah Sakit Kanker Dharmais tidak hanya melayani pasien BPJS, tetapi juga menarik pasien yang mampu secara finansial untuk berobat di sini. Dengan begitu, biaya yang masuk bisa membantu pembiayaan pasien kanker anak yang kurang mampu," ujar Menkes.

Menkes juga mengapresiasi peran komunitas dan keluarga dalam mendukung anak-anak yang berjuang melawan kanker. Ia menekankan bahwa menghadapi kanker bukan hanya soal pengobatan medis, tetapi juga dukungan psikososial yang kuat.

"Pasien kanker anak butuh dukungan dari komunitasnya. Harus ada ruang bagi keluarga dan komunitas untuk terlibat, berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan moral kepada pasien dan keluarga mereka," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Menkes mendorong penyediaan fasilitas yang lebih ramah komunitas, termasuk ruang interaksi yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga pasien dan komunitas pendukung.

Selain meningkatkan layanan di RS Kanker Dharmais, Menkes menegaskan pentingnya desentralisasi layanan kanker anak ke seluruh provinsi. Tujuan utamanya adalah agar pasien kanker anak tidak perlu bepergian jauh untuk mendapatkan perawatan.

"Tidak semua pasien kanker anak harus dirujuk ke Dharmais. Kita harus mendistribusikan

layanan ke 34 provinsi agar lebih banyak anak yang bisa mendapat pengobatan lebih dekat dengan rumah mereka," jelasnya.

Untuk mewujudkan ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah dengan dokter spesialis, fasilitas diagnostik, serta terapi mutakhir seperti terapi sel (cell therapy) dan terapi genetik.

Menkes juga menyoroti pentingnya deteksi dini kanker anak sebagai langkah utama dalam meningkatkan angka kesembuhan.

Dengan perkembangan teknologi medis, kini deteksi dini dapat dilakukan melalui pemeriksaan genetik, sirkulasi tumor DNA, dan analisis ekspresi RNA.

"Teknologi sudah berkembang pesat. Kita harus mulai menggunakan alat deteksi genetik untuk melihat potensi kanker lebih awal, seperti yang sudah dilakukan di Thailand dan Vietnam," ujar Menkes.

Ia menegaskan bahwa RS Kanker Dharmais sebagai pusat kanker nasional harus menjadi pelopor dalam penerapan teknologi medis mutakhir, sehingga dapat memberikan diagnosis dan terapi yang lebih akurat bagi pasien kanker anak.

Dengan peluncuran Rencana Aksi Nasional Kanker Anak 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan angka kesembuhan kanker anak di Indonesia, dari saat ini sekitar 24% menjadi lebih dari 50%.

"Kita ingin lebih banyak anak Indonesia yang bisa sembuh dari kanker dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Untuk itu, kita harus bekerja bersama, pemerintah, rumah sakit, komunitas, dan masyarakat," tutup Menkes.

Direktur Utama RS Kanker Dharmais menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan kanker anak melalui peningkatan fasilitas dan kolaborasi lintas sektor. "Pembangunan fasilitas baru ini merupakan bagian dari upaya kami

Menkes Budi Targetkan Strata Utama untuk RSUD Akhmad Berahim Kalimantan Utara

TANA TIDUNG - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung menyandang Strata Utama untuk pelayanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, KIA, dan TB.

Target ini sejalan dengan salah satu Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC)/ Quick Wins Kemenkes terkait Peningkatan kelas RS. Pada 2025 Kemenkes akan melakukan pembangunan guna meningkatkan kelas rumah sakit dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C di 32 lokus terpilih.

Untuk merealisasikan peningkatan kelas DRS menjadi kelas C, Menkes Budi melakukan groundbreaking pembangunan RSUD Akhmad Berahim.

"Hari ini saya di RSUD Kabupaten Tana Tidung (RSUD Akhmad Berahim). Ini kalau naik speed



boat dari Tarakan 3 jam dari sana. Jadi kebayang kalau ada orang kena sakit stroke atau jantung mesti dibawa 3 jam ke Tarakan," ujar Menkes Budi, Jumat (21/2). Menkes Budi meminta RSUD Akhmad Berahim harus dapat meningkatkan kualitas layanan rujukan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung.

Setelah pembangunan terlaksana, selanjutnya RSUD harus mampu melakukan

pengampunan untuk RS wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Puskesmas. Menkes Budi juga berpesan agar RSUD Akhmad Berahim mengembangkan layanan kesehatan digital, melakukan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah juga harus turut menegakkan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibu-

tuhan. Menkes berharap dengan dibangunnya rumah sakit ini diharapkan kalau ada serangan stroke, sakit jantung, dan juga termasuk kanker, atau ginjal bisa dilayani di sini.

"Ini adalah rumah sakit ketiga yang dibangun oleh bapak Presiden Prabowo terkait dengan program quick wins beliau dari 66 rumah sakit di daerah-daerah tertinggal yang kita akan bangun dalam 2 tahun ke depan," ujarnya. (W)

untuk memberikan layanan yang lebih nyaman dan berkualitas bagi pasien kanker, khususnya anak-anak pejuang kanker di Indonesia," ujar dr. Soeko.

dr. Soeko menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru RS Kanker Dharmais yang berlangsung selama dua tahun ini menghadapi berbagai tantangan, namun kini telah siap digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pasien kanker anak.

"Setelah dua tahun penuh tantangan, akhirnya gedung baru ini dapat dioperasikan. Sekarang tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan fasilitas ini dapat digunakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat," katanya.

Fasilitas baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi juga mampu menarik

lebih banyak pasien kanker, termasuk pasien dari luar negeri, untuk menjalani pengobatan di RS Kanker Dharmais.

RS Kanker Dharmais juga semakin memperkuat kolaborasi dengan berbagai rumah sakit dan organisasi dalam upaya meningkatkan akses layanan kanker anak di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik kerja sama dengan berbagai rumah sakit, termasuk yang hadir hari ini seperti Rumah Sakit Mamusada Bali dan rumah sakit lainnya. Kolaborasi ini penting agar layanan kanker anak bisa menjangkau lebih banyak pasien di berbagai daerah," ujar dr. Soeko.

Selain itu, RS Kanker Dharmais juga menggandeng organisasi profesi, yayasan kanker, dan komunitas peduli kanker anak untuk mendukung berbagai inisiatif, seperti

pendampingan pasien dan keluarganya, serta penggalangan dana untuk obat-obatan yang sulit diakses.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Soeko menekankan bahwa kanker anak memiliki prinsip yang sama dengan kanker dewasa dalam hal deteksi dini. Semakin cepat kanker terdiagnosis, semakin besar peluang kesembuhannya.

"Jika kanker anak ditemukan sejak dini, peluang sembuh jauh lebih tinggi. Berbeda dengan kanker dewasa yang bisa dicegah dengan gaya hidup sehat, kanker anak lebih sulit dicegah karena umumnya merupakan faktor genetik. Oleh karena itu, fokus kita adalah deteksi dini dan pengobatan yang cepat," jelasnya.

Sebagai langkah inovatif, RS Kanker Dharmais juga mengembangkan layanan pemeriksaan genomik, yang memungkinkan deteksi

risiko kanker lebih dini melalui teknologi mutakhir.

RS Kanker Dharmais, sebagai Pusat Kanker Nasional, berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kanker anak, termasuk melalui penelitian, inovasi, dan peningkatan sumber daya manusia di bidang onkologi.

Kami ingin RS Kanker Dharmais menjadi pusat layanan kanker yang tidak hanya melayani pasien dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi rujukan bagi negara-negara lain. Ini adalah langkah besar yang harus kita jalani bersama," tutup dr. Soeko.

Dengan peluncuran Rencana Aksi Nasional Kanker Anak 2025-2029, serta penguatan fasilitas dan kolaborasi, RS Kanker Dharmais semakin siap dalam menghadapi tantangan kanker anak di Indonesia. (r)

Baubau Post
 Kritik, Lugas, Independen
 Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post.
 Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
 Redpel : Hengky TA
 Korlip : Hengky T.A
 Redaktur : Alyakin, Kasrun
 Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna, Hafis, Harman Momi

Layouter : Rlirin
 Pracetak : Aditya
 Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
 Komisaris : Erna Agule
 Direktur Utama : Andina Latief, SKM
 Manager Keuangan : Nabila D.A
 Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
 Kepala Sirkulasi : Jamal
 Administrasi : Salvana
 Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
 Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
 Kepala Biro Buton : Rahman
 Kepala Biro Busel : Salvana
 Kepala Biro Buteng : Andini
 Kepala Biro Bombana :
 Kepala Biro Sultra :
 Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
 Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
 Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul
 Baubau : Jaya
 Agen Pasarwajo :
 Agen Butur : Samrihan
 Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
 Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
 Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Menteri ATR Bantah Sertifikat Pagar Laut Milik Aguan Batal Dicabut



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tetap mencabut SHGB pagar laut milik Aguan.

Laporan: Hamid

JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membantah SHGB di kawasan pagar laut milik Aguan batal dicabut. Ini sekaligus untuk membantah kabar yang diberitakan sejumlah media nasional.

“Sekarang berita-berita di berbagai situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB miliknya Pak Aguan yang ada di pinggir Pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar,” ujar Nus-

ron di Jakarta, Minggu (23/2) dikutip dari Antara.

Terkait isu yang berkembang seputar sertipikat tanah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, dirinya menegaskan bahwa semua sertipikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan.

Sebab ketentuan itu menurutnya tidak ada relevansi mengenai siapa yang memiliki sertipikat tersebut.

Sejak awal polemik pagar laut mencuat di masyarakat, Menteri Nusron dengan jelas dan konsisten me-

nyampaikan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan total 280 sertipikat.

Diketahui, dari 280 sertipikat tersebut, terdapat 58 sertipikat yang ada di dalam garis pantai dan 222 sertipikat di luar garis pantai.

“Kebijakan nya adalah semua yang ada di luar garis pantai, semuanya dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertipikat,” kata Nusron.

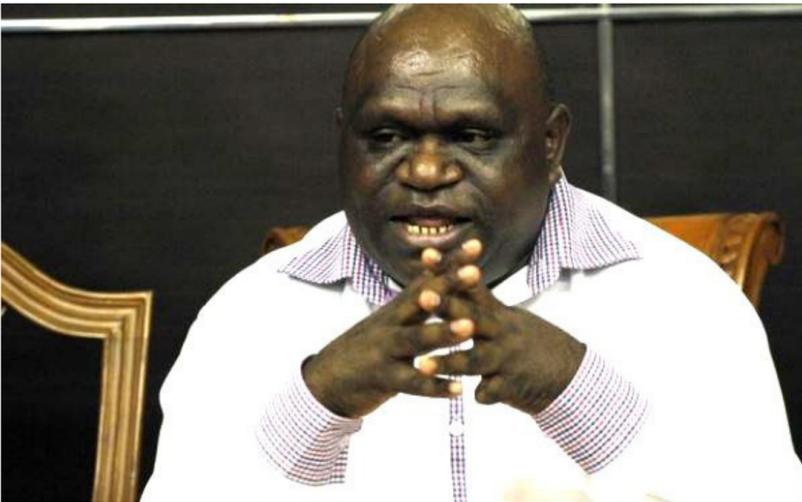
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa masih terdapat 13 sertipikat SHGB lainnya, yang sedang

dalam proses penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan karena wilayah di dalamnya terdapat bidang yang separuh masuk garis pantai dan separuhnya lagi di luar garis pantai.

Ke depannya, Nusron berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penyelesaian masalah pagar laut, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

“Kalau memang di dalam garis pantai ada SHGB pemilik sah nya. Kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang tidak benar semua dibatalkan,” ujarnya. (*)

MenHAM Cek Dugaan Pemecatan Vokalis Sukatani Sebagai Guru



Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi soal dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani.

Pewartanya: Alwan

JAKARTA- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi soal dugaan pem-

ecatan salah satu vokalis band Sukatani.

“Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran informasi,” kata Pigai dalam unggahan di media sosial X, Sabtu (23/2).

Salah satu vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, dikabarkan dipecat dari sekolahnya tempatnya mengajar.

Novi merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Ban-

jarnegara, Jawa Tengah. Beredar kabar ia dipecat seiring maraknya berita soal lagu Bayar Bayar yang membuatnya meminta maaf dan menarik lagu tersebut.

Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi.

“Jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia,” katanya.

Bareskrim Periksa Razman 4 Maret soal Kasus Ricuh di Sidang PN Jakut



Laporan: Hadi

JAKARTA - Bareskrim Polri mengaku bakal memeriksa advokat Razman Nasution sebagai terlapor dalam kasus ricuh persidangan di PN Jakarta Utara, pada 4 Maret mendatang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan sediaan Razman telah dipanggil untuk diklarifikasi pada Kamis (20/2) kemarin. Akan tetapi, Razman tidak memenuhi panggilan penyidik dan meminta untuk dijadwalkan ulang.

“Saudara Razman kemarin sudah dipanggil, tidak bisa hadir dan menyampaikan bahwa nanti akan memenuhi undangan klarifikasi tanggal 4 Maret,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/2).

Djuhandhani menjelaskan kasus kericuhan yang dilaporkan oleh PN Jakarta Utara itu masih dalam tahap penyelidikan. Ia menyebut penyidik akan segera mempercepat proses permintaan klarifikasi awal untuk menentukan apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

“Untuk prosesnya kita akan segera mempercepat apakah ini bisa dinaikkan proses-proses lebih lanjut atau tidak. Jadi kita tetap berupaya secepatnya untuk menjawab kasusnya seperti apa,” tuturnya.

Sebelumnya, PN Jakarta Utara resmi melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan rekan-rekannya ke Bareskrim Polri, pada Selasa (11/2), menuntut kericuhan yang terjadi dalam persidangan.

Humas PN Ja-

kut Maryono mengatakan laporan tersebut diterima dengan nomor STTL/70/II/2025/Bareskrim tertanggal 11 Februari 2025. Aksi Razman itu dinilai telah menghina marwah dan kehormatan lembaga pengadilan.

Razman Nasution dilaporkan tiga pasal yakni Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan, dan Pasal 217 KUHP tentang kegaduh di pengadilan.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri juga telah memeriksa pengacara kondang Hotman Paris yang berada di ruang pengadilan saat terjadi kericuhan. Hotman adalah sosok yang didatangi Razman di ruang sidang itu hingga berbuah kericuhan, bahkan sampai ada advokat yang naik ke atas meja. (*)

Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan Kepolisian sudah minta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan.

“Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM,” ujarnya.

Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar.

Melalui unggahan di media sosial, dua personel Sukatani,

Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectro-guy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, meminta maaf atas lirik pada lagu tersebut.

Lagu yang viral ini mengandung lirik tentang harus membayar oknum polisi untuk segala urusan. Lagu tersebut kini telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif telah menawarkan Novi untuk menjadi guru lagi agar bisa mengajar kembali.

“Saya, Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan

tangan terbuka siap menerima Mbak Novi,” kata Fahmi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu (22/2).

Fahmi berujar jika Novi berkenan untuk kembali mengajar, dirinya akan memfasilitasi dan mensupport.

“Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdikan di sekolah di Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport,” ucapnya di tengah kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang. (*)

